



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN PPID

PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA

TAHUN
2022
&
SEMESTER I
TAHUN 2023

TIM PPID
PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan efisien. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di BKKBN serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan Undang-undang dan Perka BKKBN tersebut. Secara garis besar, laporan ini memuat dinamika permohonan informasi beserta kendala dan rekomendasinya yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

Berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan pengelolaan permohonan informasi dan data di Tahun 2022 dan semester I Tahun 2023 dimuat dalam laporan ini berisi berbagai upaya dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan meskipun mengalami kondisi yang dihadapi. Adapun informasi dan data yang dimuat sebagian besar berisi Informasi Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat mengenai profil Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, program Pembangunan Keluarga,

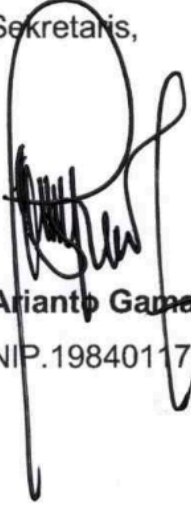
Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Papua.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pemohon informasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

Jayapura, 17 Juli 2023

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua PPID
Sekretaris,


Arianto Gama, SH
NIP.198401172009011007

Penanggung Jawab
Kepala Perwakilan



Dis. Nerius Auparai, M.Si
NIP.196408221992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Tahun 2022	1
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2022	2
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	12
Anggaran Layanan Informasi Publik	12
Rekomendasi	13
Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Semester I Tahun 2023	14
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Semester I Tahun 2023	15
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	19
Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	24
Anggaran Layanan Informasi Publik	24
Rekomendasi	25
Lampiran	



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN PPID

PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA

TAHUN
2022

TIM PPID
PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2022



Gambar Suasana Rapat ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

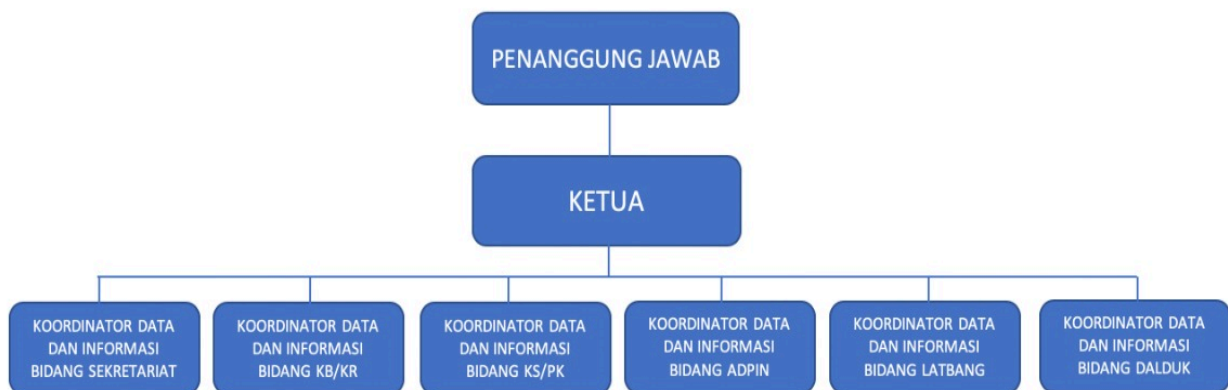
Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.



Gambar Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP dan tindak lanjut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di BKKBN serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor : 522/AK.03/J/2022 TAHUN 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2022.



Gambar Struktur PPID Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di BKKBN, PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua wajib mengumumkan :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-berkala/
2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-septa-merta/
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-setiap-saat/

PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website BKKBN Papua pada website <https://papua.bkkbn.go.id/> paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maupun datang langsung Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain :

- Informasi mengenai profil BKKBN, dapat dilihat di halaman Web: https://papua.bkkbn.go.id/?page_id=527
- Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting serta informasi terkini terkait Program Bangga Kencana pada laman Slider Utama Website

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BKKBN dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. SOP tersebut diantaranya :

- SOP Pengelolaan Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.

II. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

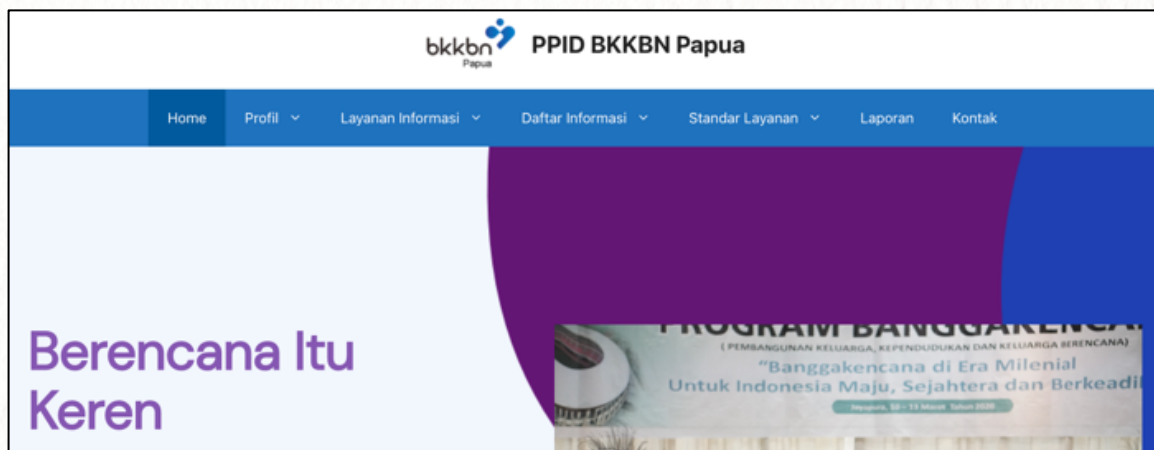
Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik yang telah ditentukan. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada, diantaranya :

1. Layanan Melalui Website

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web, baik website BKKBN

Papua <https://papua.bkkbn.go.id> maupun website E-PPID BKKBN Papua <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/>.

Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri. Adapun menu-menu pada website BKKBN Papua diantaranya Profil, Berita, Informasi Publik, materi-materi yang dapat diunduh melalui menu Unduh Materi. Sedangkan untuk menu pada website E-PPID BKKBN Papua diantaranya Profil, Layanan Informasi, Daftar Informasi, dan Standar Layanan.



Gambar Tampilan Website <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/>



Gambar Tampilan Website <https://papua.bkkbn.go.id>

Adapun untuk jumlah berita yang telah dirilis selama Tahun 2022 sebanyak **28** berita dengan rincian sebagai berikut:

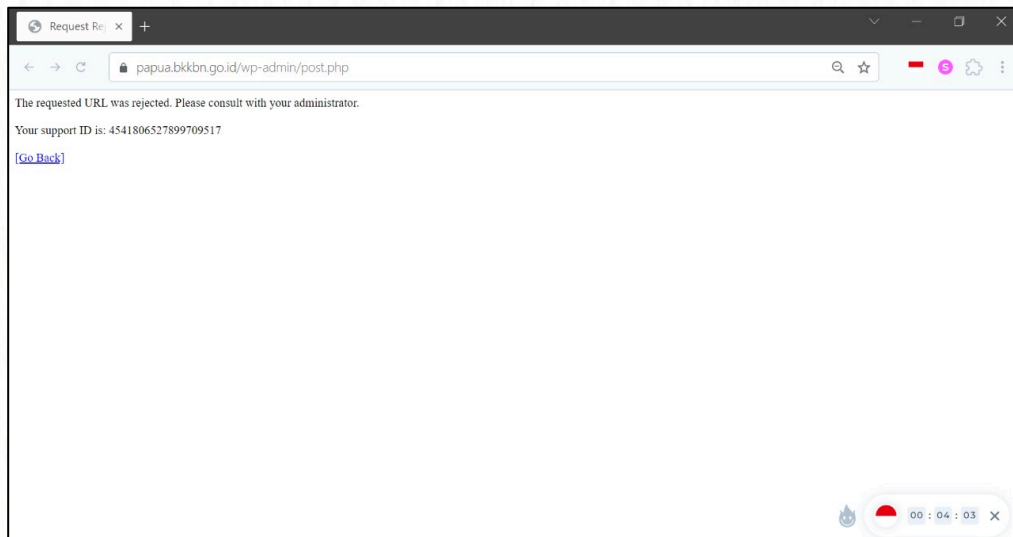
Tabel Rincian 28 Berita Tahun 2022 di Website BKKBN Papua

Bulan	Jumlah Berita	Judul
Januari	0	-
Februari	1	Upaya Cegah Stunting BKKBN Papua bersama Akademisi Universitas Cenderawasih
Maret	3	Percepatan Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana di Kabupaten Biak Numfor
		Pengumuman Seleksi Administrasi Pengadaan Tenaga Perorangan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Papua 2022
		Pengumuman Pengadaan Tenaga Perorangan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Papua 2022
April	0	-
Mei	3	Pembekalan Satgas Stunting Provinsi Papua di Kota Jayapura
		Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 Tahun 2022
		Pertemuan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi (Pembekalan Satgas Stunting) di Kota Jayapura
Juni	3	Peringati Harganas ke-29 Tahun 2022, BKKBN Papua dan Mitra Ajak Masyarakat Cegah Stunting

		<p>Pembekalan kepada Mahasiswa Peduli Stunting di Fakultas Kesehatan Masyarakat</p> <p>Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award</p>
Juli	12	<p>Workshop Perumusan Isu Pengendalian Penduduk dalam rangka Hari Kependudukan Dunia Tahun 2022</p> <p>Sosialisasi Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Mahasiswa Peduli Stunting untuk Papua bebas Stunting</p> <p>BKKBN Papua gandeng Jurnalis dalam Percepatan Penurunan Stunting di Papua</p> <p>Presiden Jokowi Canangkan Revitalisasi Lapangan Merdeka di Medan</p> <p>Presiden Jokowi: Ciptakan Kemandirian Pangan untuk Penuhi Kebutuhan Asupan Gizi</p> <p>Tiba di Lapangan Merdeka, Presiden dan Ibu Iriana disambut Tradisi Adat Batak Toba</p> <p>Perwakilan BKKBN Papua Raih Juara 3 Kompetisi Karya Tulis Berbahasa Inggris di Harganas ke-29</p> <p>Jadi Tuan Rumah Harganas, Walikota Bobby Terpacu Turunkan Stunting</p> <p>Harganas XXIX, BKKBN Dorong KB Pascapersalinan Guna Tekan Prevalensi Stunting</p>

		H-2 Puncak Harganas, Kepala BKKBN Tinjau Lokasi yang Bakal Dikunjungi Presiden Jokowi
		BKKBN Papua dan Mitra lakukan Grebek Stunting pada Perayaan Harganas ke-29
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	5	Cegah Stunting dri Hulu jadi Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Papua
		Cegah Stunting di Papua, Anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang akan Menikah gunakan Elsimil
		Pembinaan Pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua oleh Sekretaris Utama BKKBN
		Dikukuhkan jadi Bapak Asuh, Pangdam XVII Cenderawasih Komitmen Bantu Percepat Turunkan Stunting di Papua
		Sosialisasi KKA Online di Kelompok BKB Mimosa Korem Kota Jayapura
November	1	Antusiasme Bidan di Papua dalam Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi
Desember	0	-

Namun beberapa kendala kerap ditemui pada website selama tahun 2022 seperti terjadinya kondisi error sehingga tidak dapat diakses maupun beberapa tampilan tidak dapat diperbaharui sehingga beberapa informasi tidak ditayangkan pada laman utama.



Gambar Screenshot Website mengalami Error / tidak dapat diakses

2. Layanan Melalui e-PPID dan Persuratan

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua melayani permintaan data melalui website e-PPID maupun persuratan seputar Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta tentang data Keluarga Berisiko Stunting berdasarkan hasil dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga.

Di tahun 2022, jumlah permintaan data yang terlayani dan terdata oleh PPID sejumlah 5 Permintaan Data, dengan rincian:

Tabel Jumlah Permintaan Data di Website e-PPID dan Surat ke BKKBN Papua

No	Tanggal Terima	Nomor Surat	Tanggal Surat	Asal	Keterangan
1	18/03/22	144/F-16/FH-111/2022	18/03/22	Universitas Yapis Fakultas Hukum	Permohonan Izin Penelitian dan Pengumpulan Data
2	29/03/22	100/0872/SET	24/01/22	Sekda Provinsi Papua	Permintaan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) Papua TA 2021

3	30/05/22	B/1200/PV.01/0065 58.2022/V/2022	24/05/22	Ombudsman RI	Permintaan Kelengkapan Data & Dokumen Laporan
4	15/06/22	055/PDIBI/V/2022	15/06/22	Pengurus Daerah IBI Provinsi Papua	Permohonan Bantuan Data
5	-	-	-	Mahasiswa (Okra)	Permintaan Data Penelitian

3. Layanan Konsultasi Melalui Media Sosial

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua juga melayani konsultasi dan tanya jawab melalui sesi komentar dan pesan langsung (*Direct Message*) tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), serta Program Percepatan Penurunan Stunting.

III. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan Informasi Publik termasuk di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dibantu oleh pegawai fungsional di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua seperti koordinator, sub koordinator, pustakawan, pranata humas, arsiparis dan pegawai fungsional yang lainnya.

IV. Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

V. Rekomendasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembaruan kembali terkait struktur organisasi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sesuai Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN dalam strukturnya;
2. Melakukan diseminasi internal yang berkesinambungan dengan anggota PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi Papua karena belum sepenuhnya paham dan peduli dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan capaian prestasi penghargaan untuk ke depannya.

Demikian laporan pengelolaan PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik yang ke depannya dan diharapkan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan informasi Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Papua.

Jayapura, 15 Februari 2023

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua PPID
Sekretaris


Arianto Gamar, SH
NIP. 198401172009011007

Penanggung Jawab
Kepala Perwakilan


Dis. Nerius Auparai, M.Si
NIP. 19640822 199203 1 001

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2023

PENGELOLAAN PPID

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA



**TIM PPID
PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA**

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2023



Gambar Suasana Rakerda BKKBN Provinsi Papua Tahun 2023

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.



Gambar Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP dan tindak lanjut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di BKKBN serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor : 1546/HK.02.02/J/2023 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2023.



Gambar Struktur PPID Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di BKKBN, PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua wajib mengumumkan :

4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-berkala/>
5. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui [laman https://e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-septa-merta/](https://e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-septa-merta/)
6. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/informasi-setiap-saat/>

PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website BKKBN Papua pada website <https://papua.bkkbn.go.id/> paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maupun datang langsung Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain :

- Informasi mengenai profil BKKBN, dapat dilihat di halaman Web: https://papua.bkkbn.go.id/?page_id=527
- Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting serta informasi terkini terkait Program Bangga Kencana pada laman Slider Utama Website

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BKKBN dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. SOP tersebut diantaranya :

- SOP Pengelolaan Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.

II. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik yang telah ditentukan. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada, diantaranya :

1. Layanan Melalui Website

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web, baik website BKKBN

Papua <https://papua.bkkbn.go.id> maupun website E-PPID BKKBN Papua <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/> .

Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri. Adapun menu-menu pada website BKKBN Papua diantaranya Profil, Berita, Informasi Publik, materi-materi yang dapat diunduh melalui menu Unduh Materi. Sedangkan untuk menu pada website E-PPID BKKBN Papua diantaranya Profil, Layanan Informasi, Daftar Informasi, dan Standar Layanan.



Gambar Tampilan Website <https://e-ppid.bkkbnpapua.online/>



Gambar Tampilan Website <https://papua.bkkbn.go.id>

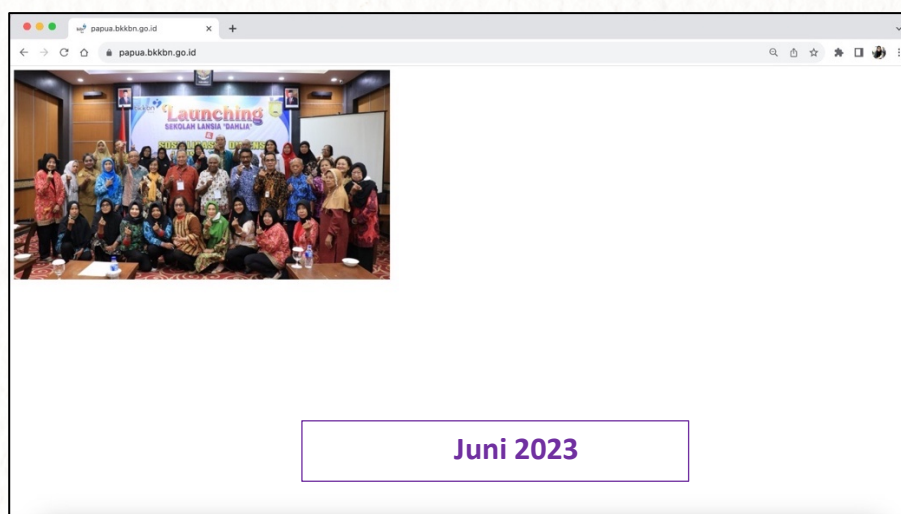
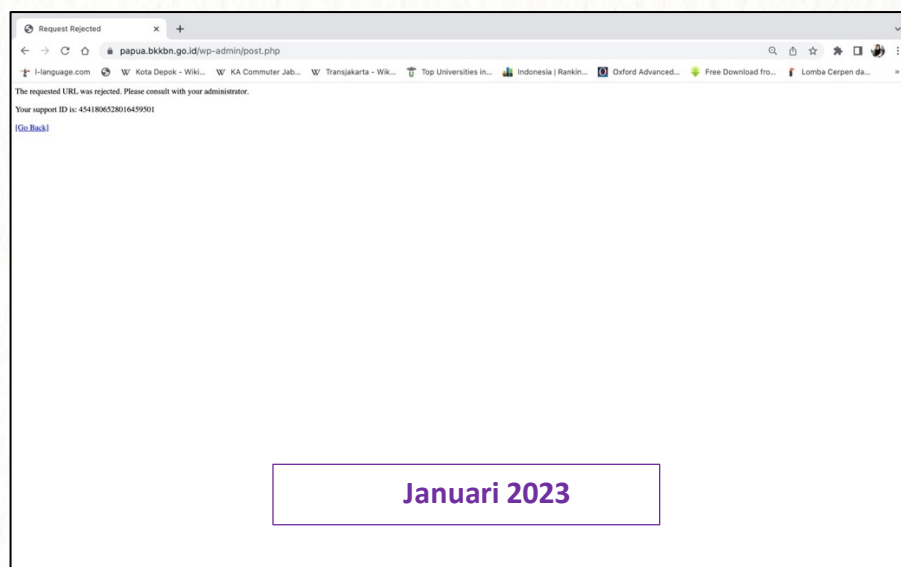
Adapun untuk jumlah berita yang telah dirilis selama Semester I Tahun 2023 sebanyak **21** berita dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian 21 Berita Semester I Tahun 2023 di Website BKKBN Papua

Bulan	Jumlah Berita	Judul
Januari	4	BKKBN Papua Pastikan Pelaksanaan Seleksi CASN PPPK Secara Objektif dan Akuntabel
		Memaknai Natal dan Tahun Baru 2023 di tengah Kesederhanaan bersama Panti Asuhan Holei Roo
		Anggaran BOKB Papua Tahun 2023 Naik, Kaper BKKBN Papua Himbau Pemanfaatan yang Lebih Baik
		Pelayanan KB di Keerom dan Kota Jayapura Jadi Penguatan Pelayanan di Tahun 2023
Februari	5	Masyarakat Sadar Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di HUT Ke-121 Merauke
		Penanganan Stunting Lebih Diseriusi, Plh Gubernur Pastikan Pemprov Papua Langsung Tangan
		Hindari Triad KRR, Demi Remaja dan Pemuda di Wamena yang Sehat dan Berkualitas
		Monev Pelaksanaan Kegiatan TPPS Tahun 2022 Provinsi Papua
		Tingkatkan Kepedulian Angka Stunting di Papua, BKKBN Papua Gelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023
Maret	8	BKKBN Papua Gelar Pra Rakerda Pantau Capaian Program Bangga Kencana Dan Penurunan Angka Stunting Di Papua
		Angka Prevalensi Stunting Naik, BKKBN Provinsi Papua Gelar Rakerda
		Kepala BKKBN Kukuhkan Bapak Dan Bunda Asuh Anak Stunting Di Papua
		Kepala BKKBN RI Evaluasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Di Papua Pada Rakerda 2023
		Kepala BKKBN Launching Implant 1 Batang Kampung KB Di Biak
		Pertama Di Papua, Klinik Fertilitas Dibuka Di Kabupaten Biak Numfor
		Kepala BKKBN RI Melantik dan Mengambil Sumpah 310 PNS Angkatan 2021 dilingkup BKKBN di Seluruh Indonesia
		Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Supiori
April	1	BKKBN RI Gelar Ujian Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK Tenaga Teknis TA 2022

Mei	2	Penguatan Integrasi Mekanisme Operasional dan Rembug Stunting di Kota Jayapura
		<i>Workshop Upgrade Tentang Kita Bicara Life Skill & Kekerasan Seksual di Kabupaten Nabire</i>
Juni	1	Pertama di Papua, Sekolah Lansia “Dahlia” diluncurkan demi terwujudnya Lansia SMART

Namun beberapa kendala kerap ditemui pada website selama semester I tahun 2023 seperti terjadinya kondisi error sehingga tidak dapat diakses maupun beberapa tampilan tidak dapat diperbaharui sehingga beberapa informasi tidak ditayangkan pada laman utama.



Gambar Screenshot Website mengalami Error / tidak dapat diakses

2. Layanan Melalui e-PPID dan Persuratan

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua melayani permintaan data melalui website e-PPID maupun persuratan seputar Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta tentang data Keluarga Berisiko Stunting berdasarkan hasil dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga.

Di semester I tahun 2023, jumlah permintaan data yang terlayani dan terdata oleh PPID sejumlah 6 Permintaan Data, dengan rincian:

Tabel Rincian Permintaan Data di Website e-PPID dan Surat ke BKKBN Papua

No	Tanggal Terima	Nomor Surat	Tanggal Surat	Asal	Keterangan
1	27/01/23	-	30/01/23	BPS Provinsi Papua	Permintaan Data
2	30/01/23	-	30/01/23	DP3AKB Kota Jayapura	Data Peta BKB Kit
3	05/05/23	476/104/DPPKB/2023	05/05/23	DP2AKB Kabupaten Kepulauan Yapen	Permintaan Data BNBA hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2021 dan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022
4	11/05/23	048/072/DPPKB/2023	11/05/23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire	Permohonan Data BNBA hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2021 dan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

5	06/06/23	521/UN20/1/7/K M/2023	06/07/23	FKM Universitas Cenderawasih	Mohon Ijin Pengambilan Data
6	07/06/23	036/IT 12/AK/2023	07/06/23	Institusi Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua	Permintaan Izin untuk Pengambilan Data

3. Layanan Konsultasi Melalui Media Sosial

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua juga melayani konsultasi dan tanya jawab melalui sesi komentar dan pesan langsung (*Direct Message*) tentang Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), serta Program Percepatan Penurunan Stunting.

III. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan Informasi Publik termasuk di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dibantu oleh pegawai fungsional di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua seperti koordinator, sub koordinator, pustakawan, pranata humas, arsiparis dan pegawai fungsional yang lainnya.

IV. Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

V. Rekomendasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sebagai berikut :

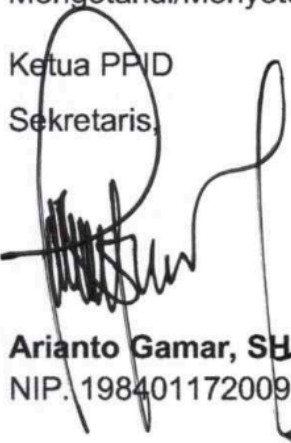
4. Perlu dilakukan pembaruan kembali terkait struktur organisasi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sesuai Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN dalam strukturnya;
5. Melakukan diseminasi internal yang berkesinambungan dengan anggota PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi Papua karena belum sepenuhnya paham dan peduli dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan capaian prestasi penghargaan untuk ke depannya.

Demikian laporan pengelolaan PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Semester I Tahun 2023 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik yang ke depannya diharapkan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan informasi Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Papua.

Jayapura, 17 Juli 2023

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua PPID
Sekretaris,



Arianto Gamar, SH
NIP. 198401172009011007

Penanggung Jawab
Kepala Perwakilan



Mrs. Nerius Auparai, M.Si
NIP. 19640822 199203 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 TENTANG PPID
DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA
NOMOR : 522/AK.03/J/2022 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa untuk membuka akses bagi setiap pemohon dan pengguna informasi public, perlu dilakukan pengujian informasi publik untuk menyeleksi informasi yang dapat diakses oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- : e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi Papua tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Kepala BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN;
9. Peraturan Kepala BKKBN No. 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Papua sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada DIPA BKKBN Perwakilan Provinsi Papua.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

KEEMPAT

: dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jayapura

Tanggal 1 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Papua



Drs. Nerijs Auparay, M.Si

NIP. 19640822 199203 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Papua
 Nomor : 522 /AK.03/J/2022
 Tanggal : 1 Maret 2022
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

NO	N A M A	JABATAN FUNSIONAL/STRUKTURAL	JABATAN PPID
1.	Drs. NERIUS AUPARAY, M.Si	Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Papua	Penanggung Jawab
2.	ARIANTO GAMAR, SH	Sekretaris Perwakilan BKKBN Prov. Papua	Ketua
3.	TUTY KURNIAWATY, SH	Arsiparis Ahli Muda	Koordinator Data dan Informasi Bidang Sekretariat
4.	Drs. JHONY SUWUH	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	Koordinator Data dan Informasi Bidang KB/KR
5.	ESMIT TEAPON, SH.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Koordinator Data dan Informasi Bidang KS/PK
6.	AHMAD SOAMOLE, SH	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Data dan Informasi Bidang ADPIN
7.	ELI MARNI TANJUNG, S.Pd, M.Si	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator Data dan Informasi Bidang Latbang
8.	SARWANDI, SE	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Koordinator Data dan Informasi Bidang DALDUK
9.	FERDINAND PALLUMPAK, SE	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Penyedia Data dan Informasi Kehumasan
10.	SITI MARIYANINGSIH, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	Penyedia Data Hasil Pengawasan
11.	TRICINTYA C. A. KOBIS, S.I.Kom.	Calon Pranata Humas Ahli	Penyedia Data Hasil Pengawasan
12.	SENTOT MURSITO, SH	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Penyedia Data dan Informasi Bidang DALDUK
13.	CHATERIND PUSPITARINI SOELARSO, S.KM	Analisis Keluarga Berencana	Penyedia Data dan Informasi Bidang KB/KR
14.	GIDION LEBANG, S.IP	Analisis Sarana Program KB	Penyedia Data dan Informasi Bidang ADPIN
15.	IRIANTO ALFIAN MARAMPUNG, S.Kom.	Analisis Bina Keluarga Balita, Anak Dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia	Penyedia Data dan Informasi Bidang KS/PK
16.	ANITA LUDIYANI, SH	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Penyedia Data dan Informasi Bidang Latbang

Catatan : Front Desk Online adalah Pengelola Website e-PPID

Ditetapkan di Jayapura
 Tanggal 1 Maret 2022
 Kepala Perwakilan BKKBN Papua

Drs. Neriuss Auparay, M.Si
 NIP. 19640822 199203 1 001

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 TENTANG PPID
DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA



**KEPUTUSAN KEPALA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA**

NOMOR : 1545/HK.02.02/J/2023 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE/WEBMAIL DAN MEDIA SOSIAL
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, publikasi, kegiatan dan pemberitaan diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan Sub Domain website di perwakilan BKKBN Provinsi Papua secara intensif;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua tentang Tim Pengelola website resmi di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga R.I. Tahun 2009 BNomor 161, Tambahan Negara R.I. Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (website Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
 3. Undnag-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 72/PER/B5/2011 tentang

Badan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial di Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada dictum pertama ini adalah:
- a. Penanggung Jawab Kegiatan
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Tim Pelaksana Pengelola Sub Domain Website, Webmail dan Media Sosial.
 2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Koordinator Pengelola Sub. Domain dan Pemimpin Redaksi
 1. Mengkoordinasikan tugas, melengkapi, menyusun dan mengupdate data yang akan dipublikasikan.
 2. Mengkoordinasikan Penyimpanan Data yang telah dipublikasikan.
 3. Bertanggungjawab terhadap persiapan data/informasi, isi redaksi, kelayakan berita/foto, melakukan koordinasi dengan anggota redaksi bidang, memimpin rapat redaksi.
 - c. Koordinator Sarana dan Prasarana Sub. Domain dan Kesekretariatan
 1. Bertanggungjawab dengan perencanaan kebutuhan hardware dan software pendukung pengelolaan Sub Domain.
 2. Bertanggungjawab pengelolaan/*maintenance hardware dan software.*
 3. Bertanggungjawab terhadap perencanaan kebutuhan sarana prasarana pendukung pengelolaan Sub Domain termasuk perencanaan pembiayaan.
 4. Melakukan tugas keadministrasian umum untuk kelancaran tugas pengelolaan Sub Domain.
 - d. Anggota Redaksi Bidang / Sekretariat
 1. Bertanggungjawab tentang materi berita Website dan Media Sosial maupun jawaban terhadap aduan masyarakat baik melalui Website/Webmail dan Media Sosial yang menyangkut terhadap tupoksi dan bidangnya masing-masing.
 2. Bertanggungjawab terhadap *backup* seluruh data dan informasi yang menyangkut tupoksi dan kegiatan bidangnya masing-masing apabila ada *feedback* dari masyarakat terhadap materi berita yang dipublikasikan.

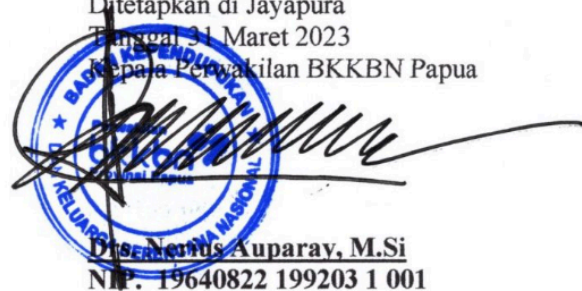
- e. Pegolah data dan informasi Bidang / Sekretariat
 1. Membantu Anggota Redaksi Bidang/Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan menyiapkan Data dan Informasi masing-masing Bidang yang diperlukan.
 2. Pengumpul dan pengolah materi Website, Webmail dan Media Sosial dari Bidang/Sekretariat masing-masing.
- f. Administrator
 1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan.
 2. Mengatasi Aplikasi dan jaringan Sub Domain.
 3. Bekerja sama dengan pihak server BKKBN Pusat.
 4. Bertanggungjawab terhadap teknis upload materi Website, Webmail dan Media Sosial.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas Tim Pelaksana ini bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KELIMA : Dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 1545/HK.02.02/J/2023 ini, maka surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Nomor 510a/AK. 03/J/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jayapura
Tanggal 31 Maret 2023
Kepala Perwakilan BKKBN Papua



Drs. Nerus Auparay, M.Si
NIP. 19640822 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Kepala BKKBN RI sebagai Laporan
2. Anggota Tim yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PAPUA
 NOMOR : 1545/HK.02.02/J/2023
 TENTANG : TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE/WEBMAIL DAN MEDIA SOSIAL
 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA TAHUN 2023


SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE/WEBMAIL DAN MEDIA SOSIAL
 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN FUNGSIONAL/STRUKTURAL
1	2	3	4
1.	Drs. Nerius Auparay, M.Si	Penanggungjawab	Kepala Perwakilan BKKBN Papua
2.	Arianto Gamar, SH	Pemimpin Redaksi	Sekretaris Perwakilan BKKBN Prov. Papua
3.	Astrid Mira Zettira, S.Pd	Ketua Redaksi Bidang Sekretariat	Analisis Perencanaan
4.	Siti Mariyaningsih, S.Kom	Anggota Redaksi Bidang Sekretariat	Pranata Humas Ahli Pertama
5.	Yudhi Dwi Fajar Maulana, S.Kom.	Anggota Redaksi Bidang Sekretariat	Analisis Data Kependudukan dan Keluarga Berencana
6.	Pernika Yanti, S.Pd	Anggota Redaksi Bidang Sekretariat	Arsiparis Ahli Muda
7.	Anita Ludyani, SH	Ketua Redaksi Rumpun Bidang KB/KR	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
8.	Chaterind P. Soelarso, S.KM	Anggota Redaksi	Analisis Keluarga Berencana
9.	Fatmawaty, S.Psi.	Anggota Redaksi	Analisis Keluarga Berencana
10.	Sentot Mursito, SH	Ketua Redaksi Rumpun Bidang KS/PK	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
11.	Tirza Laura Itaar, S.Sos, M.A	Anggota Redaksi	Widyaiswara Ahli Muda
12.	Susana Ernawati, SE	Ketua Redaksi Rumpun Bidang DALDUK	Analisis Keuangan dan BMN
13.	Alfrida Mangalik, S.Pd	Anggota Redaksi	Analisis Pendidikan dan Pelatihan
14.	Indri Dwi Irwanti, S.I.Kom	Anggota Redaksi	Analisis Ketahanan Keluarga
15.	Ahmad Soamole, SH	Ketua Redaksi Rumpun Bidang ADPIN	Pranata Humas Muda
16.	Swansy Sapulete, S.Sos, M.A	Anggota Redaksi	Analisis Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
17.	Tricintya C. A. Kobis, S.I.Kom	Anggota Redaksi	Calon Pranata Humas Ahli
18.	Drs. Jhony Suwuh	Ketua Redaksi Rumpun Bidang LATBANG	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya
19.	Vetaroy, SE, MPA	Anggota Redaksi	Analisis Manajemen Kinerja
20.	Ida Ayu Eka Laksm,i Dewi Manuaba, SE	Anggota Redaksi	Analisis Pendidikan dan Pelatihan

Ditetapkan di Jayapura

tanggal 31 Maret 2023

Kepala Perwakilan BKKBN Papua



Drs. Nerius Auparay, M.Si

NIP. 19640822 199203 1 001